



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

LAPORAN KINERJA 2025

Biro Protokol, Humas, dan Media
Sekretariat Jenderal DPD RI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadi sarana refleksi atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Sebagai unit kerja yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, Biro Protokol, Humas, dan Media terus berupaya memberikan layanan keprotokolan yang profesional, membangun komunikasi publik yang terbuka, serta mengelola informasi dan media secara efektif dan bertanggung jawab. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pimpinan dan anggota DPD RI, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan semangat kolaborasi, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta responsif terhadap kebutuhan komunikasi publik. Pemanfaatan media, baik konvensional maupun digital, terus dioptimalkan agar informasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja DPD RI dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Biro Protokol, Humas, dan Media. Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas kinerja ke depan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan.

Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan ke depan.

Penyusunan laporan ini juga diharapkan menjadi sarana evaluasi dan refleksi guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media secara berkelanjutan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan serta penguatan peran biro dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media,



Mahyu Darma, S.H., M.H.
NIP. 196805301995031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan telah direviu	4
Ikhtisar Eksekutif: tabel capaian dan anggaran	5
Bab I Pendahuluan	7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
B. Mandat dan Peran Strategis	8
C. Sistematika Laporan	11
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
B. Matriks	18
C. Prioritas Nasional	18
D. Perjanjian Kinerja	20
E. Anggaran Tahun 2025	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Pengukuran Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	27
C. Tahapan dan Langkah-langkah Pencapaian Target 2025	28
D. Perbandingan Capaian 2024 dengan 2025	31
E. Hasil Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Program Tahun 2025	31
Bab IV Kesimpulan dan Upaya untuk Tahun Mendatang	62
A. Kesimpulan	62
B. Upaya dan Strategi Untuk Tahun Mendatang	63

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 telah direviu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta untuk memastikan bahwa informasi kinerja yang disajikan telah disusun secara andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil reviu digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media pada periode selanjutnya.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur,

Nana Sutisna, S.I.P., M.Si.
NIP. 196607211988021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 menyajikan ringkasan pelaksanaan tugas, capaian kinerja, serta tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja biro dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui layanan keprotokolan, kehumasan, dan pengelolaan media yang profesional dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Biro Protokol, Humas, dan Media berfokus pada peningkatan kualitas layanan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPD RI, penguatan komunikasi publik yang informatif dan inklusif, serta optimalisasi pengelolaan media untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan serta selaras dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja berhasil direalisasikan dengan baik. Layanan keprotokolan berjalan secara tertib dan profesional, mendukung kelancaran agenda kelembagaan. Di bidang kehumasan dan media, diseminasi informasi mengenai kegiatan, peran, dan fungsi DPD RI semakin luas melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital dan media sosial, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Di sisi lain, laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain dinamika kebutuhan komunikasi publik yang semakin cepat, tuntutan transparansi yang semakin tinggi, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Sebagai tindak lanjut, Biro Protokol, Humas, dan Media terus melakukan evaluasi dan perbaikan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi dalam layanan dan pengelolaan informasi.

Ikhtisar eksekutif ini memberikan gambaran umum mengenai kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar bagi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun mendatang guna

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selanjutnya, ringkasan hasil/capaian sasaran kinerja serta realisasi anggaran Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1. Capaian Sasaran Kinerja Kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif	Nilai capaian RB pelayanan informasi publik (K ₃₁₁₇)	0,9	0,9	100%

Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

Rincian Output	Kinerja		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Rincian <i>Output</i> 1: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
	Rp10.975.500.000,00	Rp10.873.148.703,00	99,07%
Rincian <i>Output</i> 2: Layanan Protokoler			
	Rp1.824.500.000,00	1.592.162.763	87,27%
Total Persentase Capaian Anggaran			97,39%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media dibentuk didasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Tugas dan Fungsi Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan, dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tersebut, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

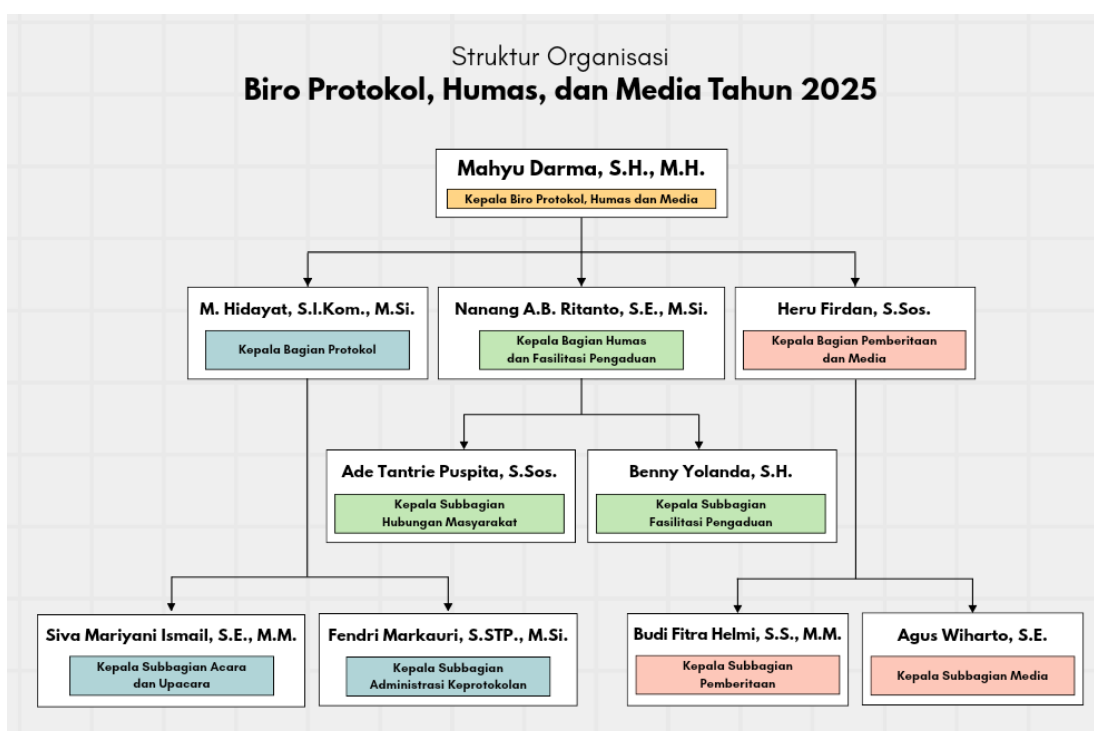
- a. penyiapan koordinasi di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media;
- c. pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan, hubungan masyarakat, fasilitasi pengaduan dan media; dan
- d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media.

2. Struktur Organisasi

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Protokol, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan, dan Bagian Pemberitaan dan Media dengan tugas masing-masing sebagaimana berikut:

- a. Bagian Protokol, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang keprotokolan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat dan fasilitasi pengaduan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- c. Bagian Pemberitaan dan Media, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pemberitaan dan media Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Lebih lanjut, struktur organisasi Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media beserta pejabatnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

B. Mandat dan Peran Strategis

1. Mandat Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI

Biro Protokol, Humas, dan Media mempunyai mandat utama untuk:

- a. Menyelenggarakan fungsi keprotokolan;
 - Mendukung kelancaran kegiatan pimpinan dan anggota DPD RI sesuai ketentuan keprotokolan negara.
 - Menjaga tata kehormatan, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam setiap kegiatan resmi.
- b. Melaksanakan fungsi kehumasan dan komunikasi publik;
 - Menyampaikan informasi kebijakan, kegiatan, dan kinerja DPD RI kepada publik.
 - Membangun citra positif, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap DPD RI.
- c. Mengelola media dan diseminasi informasi;
 - Mengelola hubungan dengan media massa.
 - Mengembangkan dan mengelola media komunikasi (media sosial, *website*, publikasi, dokumentasi audiovisual).
- d. Memberikan dukungan strategis komunikasi kelembagaan;
 - Mendukung pimpinan dan alat kelengkapan DPD RI melalui strategi komunikasi yang terintegrasi.

2. Peran Strategis Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI

Biro Protokol, Humas, dan Media memiliki peran strategis sebagai:

- a. Wajah dan Representasi Institusi DPD RI;
 - Menjadi garda terdepan dalam membangun citra kelembagaan DPD RI.
 - Menentukan persepsi publik terhadap peran dan kinerja DPD RI.
- b. Penghubung antara DPD RI dan publik;
 - Menjembatani komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat.
 - Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses.
- c. Penopang Kepemimpinan dan Diplomasi Parlemen;
 - Mendukung kegiatan pimpinan DPD RI, baik nasional maupun internasional.
 - Menjamin standar keprotokolan dalam hubungan antarlembaga dan antarnegara.
- d. Pengelola Isu dan Opini Publik;
 - Melakukan manajemen isu strategis.

- Merespons pemberitaan negatif, disinformasi, dan krisis komunikasi.
- e. Penggerak Transformasi Digital Komunikasi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media social.
 - Mengadaptasi pola komunikasi kelembagaan sesuai perkembangan teknologi informasi.

3. Masalah Strategis yang Dihadapi

a. Bidang Protokol

- 1) Kompleksitas agenda pimpinan dan anggota.

Tingginya intensitas kegiatan Pimpinan maupun Anggota DPD RI serta variasi forum baik tingkat nasional maupun internasional, di dalam atau di luar negeri.

- 2) Perubahan regulasi dan standar keprotokolan.

Perubahan tersebut menuntut peningkatan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) secara berkelanjutan.

- 3) Koordinasi lintas Lembaga.

Tantangan sinkronisasi dengan protokol lembaga lain dan pemerintah daerah.

b. Bidang Hubungan Masyarakat

- 1) Rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap peran DPD RI.

Fungsi dan kewenangan DPD RI sering disalahpahami masyarakat. Masyarakat juga belum mengenal DPD RI sebagai lembaga legislatif dengan baik.

- 2) Tantangan membangun citra kelembagaan.

Pemberitaan media yang cenderung lebih fokus pada lembaga legislatif lain.

- 3) Manajemen komunikasi krisis.

Respons cepat dan tepat terhadap isu sensitif dan dinamika politik.

c. Bidang Media

- 1) Perubahan pola konsumsi informasi publik.

Peralihan dari media konvensional ke media digital dan media sosial.

- 2) Keterbatasan SDM dan kapasitas teknis.

Kebutuhan tenaga profesional di bidang jurnalistik, konten kreatif, dan audiovisual.

- 3) Pengelolaan *multi-platform*.

Konsistensi pesan dan kualitas konten di berbagai kanal komunikasi.

- 4) Ancaman disinformasi dan hoaks (berita bohong/informasi palsu).

Perlunya penguatan sistem monitoring dan klarifikasi informasi.

4. Implikasi Strategis

Masalah-masalah yang dipaparkan tersebut di atas menuntut agar dilakukan:

- a. Penguatan strategi komunikasi kelembagaan terpadu;
- b. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital;
- d. Penguatan koordinasi internal dan eksternal.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai unit kerja pendukung pencapaian kinerja organisasi. Uraian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, serta peran/aspek strategis biro dalam mendukung tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi unit kerja.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 serta perencanaan kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 yang mencakup tujuan dan sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Bab ini juga menjelaskan keselarasan perencanaan kinerja biro dengan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, serta keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan hasil pengukuran, capaian kinerja, dan evaluasi kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media selama tahun 2025. Uraian meliputi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, analisis kinerja atas keberhasilan dan kendala pencapaian sasaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, termasuk realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja unit

kerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab ini menjadi inti laporan dalam menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja biro sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Bab IV Kesimpulan dan Upaya untuk Tahun Mendatang

Bab ini memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi. Selain itu, disajikan langkah-langkah perbaikan, rekomendasi, serta upaya strategis yang akan dilakukan pada tahun mendatang sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka perencanaan kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media untuk periode 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI dan Rencana Strategis Deputi Administrasi yang telah disusun pada awal 2025. Penyusunan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025 – 2029 tersebut tentu tidak terlepas dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yaitu:

1. Memberi dukungan administratif, operasional, keahlian dan pengelolaan kantor DPD RI di ibu kota provinsi;
2. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam Sidang Paripurna.

Dalam uraian selanjutnya, sebagai bagian dari Deputi Bidang Administrasi, dukungan teknis administratif yang dapat diberikan oleh Biro Protokol, Humas, dan Media di antaranya meliputi:

1. Penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
2. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
3. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa Arah Kebijakan dan Strategi DPD RI Tahun 2025–2029 salah satunya menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui peningkatan standar pelayanan publik yang mengacu pada *best practice*. Kebijakan ini sejalan dengan peran dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, komunikasi kelembagaan, serta layanan keprotokolan.

Dalam konteks tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media berperan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan DPD RI melalui penyediaan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Peningkatan standar pelayanan dilakukan dengan penguatan sistem dan prosedur layanan kehumasan dan media, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Selain itu, penerapan *best practice* dalam layanan keprotokolan turut mendukung citra kelembagaan DPD RI yang profesional dan berwibawa. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal, Biro Protokol, Humas, dan Media menjadi bagian integral dalam mewujudkan arah kebijakan DPD RI Tahun 2025–2029, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola yang efektif dan modern.

Arah kebijakan selanjutnya adalah peningkatan sinergitas dengan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dengan salah satu strategi penerapannya adalah mengembangkan protokol koordinasi yang jelas dengan lembaga negara lain. Kebijakan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media, khususnya dalam aspek koordinasi, komunikasi, dan keprotokolan kelembagaan.

Biro Protokol, Humas, dan Media berperan strategis dalam mengembangkan dan menerapkan protokol koordinasi yang jelas dengan lembaga negara lain dan pemerintah daerah. Melalui fungsi keprotokolan, biro memastikan bahwa tata cara hubungan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan resmi, kunjungan kerja, rapat koordinasi, serta acara kenegaraan dan kedinasan berjalan sesuai dengan ketentuan, etika, dan hierarki kelembagaan yang berlaku. Protokol koordinasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga.

Selain itu, dari sisi kehumasan dan media, Biro Protokol, Humas, dan Media berperan dalam mengelola komunikasi publik dan antar-lembaga agar pesan, kebijakan, dan hasil koordinasi dapat disampaikan secara konsisten, akurat, dan terintegrasi. Pengelolaan informasi yang efektif membantu membangun kesamaan persepsi, memperkuat kepercayaan antar lembaga, serta mencegah terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan lembaga negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Biro Protokol, Humas, dan Media menjadi penghubung utama dalam mendukung arah kebijakan peningkatan sinergitas tersebut, baik melalui penyusunan standar dan mekanisme keprotokolan koordinasi, penguatan sistem komunikasi kelembagaan, maupun penyebaran informasi hasil kerja sama. Peran ini mendukung terwujudnya hubungan antar lembaga yang harmonis, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan strategis DPD RI.

Arah kebijakan lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media adalah penguatan sistem informasi dan partisipasi publik dengan membangun sistem informasi publik yang transparan dan mudah diakses. Komitmen terhadap transparansi diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi publik yang komprehensif dan mudah diakses. Setiap kegiatan, keputusan, dan proses di DPD RI didokumentasikan secara digital dan disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sistem ini menyediakan akses terbuka terhadap jadwal sidang, agenda pembahasan, hasil *voting*, laporan keuangan, dan berbagai informasi penting lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kinerja wakil mereka secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.

Strategi lain yang dapat diterapkan dalam penguatan sistem informasi dan partisipasi publik adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media untuk sosialisasi. Strategi komunikasi publik dikembangkan melalui pemanfaatan optimal berbagai *platform* media digital. DPD RI memanfaatkan media sosial, *website* resmi, podcast, webinar, dan *channel* YouTube untuk menyebarkan informasi tentang program, kebijakan, dan kegiatan parlemen. Konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami diproduksi secara konsisten untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, membangun sistem dokumentasi dan *knowledge management* yang efektif juga perlu diterapkan sebagai strategi dalam penguatan sistem informasi dan partisipasi publik. Sistem dokumentasi dan *knowledge management* yang efektif menjadi fondasi keberlanjutan program Parlemen Digital. Seluruh pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran dari setiap proses demokratis didokumentasikan secara sistematis dan dapat diakses untuk kepentingan penelitian, evaluasi, dan pengembangan kebijakan di masa depan. Database pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi

juga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi penerus dan referensi bagi institusi legislatif lainnya dalam mengembangkan praktik terbaik parlemen digital.

Setiap arah kebijakan dan strategi tersebut dirancang untuk:

1. Mendukung pencapaian visi DPD RI sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif;
2. Memperkuat peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
3. Meningkatkan efektivitas DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah;
4. Berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, implementasi tahunan arah kebijakan dan strategi DPD RI Tahun 2025 – 2029 pada tahun 2025 ini adalah pondasi dan penguatan sistem melalui:

1. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
2. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan
3. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
5. Peningkatan Sinergitas
6. Penguatan Sistem Informasi

Implementasi tahunan Arah Kebijakan dan Strategi DPD RI Tahun 2025–2029 pada tahun 2025 yang difokuskan pada pondasi dan penguatan sistem tersebut memiliki keterkaitan langsung dan strategis dengan tugas dan fungsi Biro Protokol, Humas, dan Media. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
Biro Protokol, Humas, dan Media berperan dalam mendukung fungsi legislasi dan representasi DPD RI melalui pengelolaan komunikasi publik yang efektif. Penyebarluasan informasi terkait kegiatan legislasi, aspirasi daerah, serta peran anggota DPD RI dilakukan secara transparan dan terstruktur agar dapat dipahami oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Selain itu, layanan keprotokolan mendukung kelancaran kegiatan resmi anggota DPD RI dalam menjalankan fungsi representasinya di tingkat nasional maupun daerah.
2. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan

Dalam mendukung fungsi pengawasan, Biro Protokol, Humas, dan Media berperan dalam mengelola publikasi hasil pengawasan serta komunikasi kelembagaan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan secara akurat dan tepat waktu meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat posisi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

3. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran

Biro Protokol, Humas, dan Media mendukung optimalisasi fungsi pertimbangan anggaran melalui penyampaian informasi yang jelas dan terkoordinasi mengenai sikap, rekomendasi, dan pertimbangan DPD RI terkait kebijakan anggaran. Dukungan keprotokolan juga memastikan kegiatan rapat, konsultasi, dan koordinasi terkait anggaran berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

Keterkaitan paling signifikan terletak pada penguatan kelembagaan dan tata kelola, di mana Biro Protokol, Humas, dan Media menjadi garda terdepan dalam peningkatan standar pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta citra kelembagaan DPD RI. Penerapan SOP layanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan profesionalisme aparatur merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola yang baik.

5. Peningkatan Sinergitas

Biro Protokol, Humas, dan Media berperan sebagai penghubung komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara lain, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui pengembangan protokol koordinasi dan pengelolaan komunikasi antar lembaga, biro mendukung terciptanya sinergi yang efektif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan DPD RI.

6. Penguatan Sistem Informasi

Dalam rangka penguatan sistem informasi, Biro Protokol, Humas, dan Media berperan aktif dalam pengelolaan kanal informasi resmi, media digital, dan diseminasi informasi publik. Penguatan sistem informasi ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, Biro Protokol, Humas, dan Media memiliki peran strategis sebagai pendukung utama implementasi tahunan arah kebijakan dan strategi DPD RI Tahun 2025–

2029, khususnya dalam membangun pondasi sistem kelembagaan, komunikasi, dan pelayanan informasi publik yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

B. Matriks

Matriks Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Matriks Laporan Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif	Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik (K ₃₁₁₆)	Nilai	0,9	0,9	100%

C. Prioritas Nasional

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebuakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029,

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi komunikasi publik, pelayanan informasi, dan keprotokolan kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, prinsip demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks penguatan ideologi Pancasila, Biro Protokol, Humas, dan Media berperan dalam menyampaikan informasi dan narasi kelembagaan DPD RI yang menegaskan nilai persatuan, keadilan sosial, musyawarah, dan ke-bhinneka-an. Melalui pengelolaan konten komunikasi publik dan media, Biro Protokol, Humas, dan Media turut membangun pemahaman masyarakat terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada aspek penguatan demokrasi, Biro Protokol, Humas, dan Media mendukung keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat melalui pelayanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Diseminasi kegiatan legislasi, pengawasan, dan representasi anggota DPD RI menjadi sarana edukasi publik sekaligus penguatan akuntabilitas demokratis lembaga negara.

Sementara itu, dalam mendukung penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, Biro Protokol, Humas, dan Media memastikan bahwa pelayanan informasi publik dilaksanakan secara adil, nondiskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat mencerminkan komitmen kelembagaan DPD RI terhadap prinsip-prinsip HAM.

Dengan demikian, Biro Protokol, Humas, dan Media menempati posisi penting sebagai penghubung antara lembaga dan publik, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Peran tersebut berkontribusi secara nyata dalam memperkuat ideologi Pancasila, memperkuat praktik demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas Nasional 1.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada awal tahun.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah merubah beberapa ketentuan tentang perjanjian kinerja yang awalnya merupakan penetapan kinerja. Salah satunya terkait dengan ruang lingkup perjanjian kinerja yaitu dimuatnya perjanjian kinerja yang disepakati terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan.

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan Perjanjian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media yang memuat informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

Perjanjian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media yang telah ditetapkan, telah direviu dan diukur untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media. Sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Biro Protokol, Humas, dan Media dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif	Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik (K ₃₁₁₆)	0,9

E. Anggaran Tahun 2025

Anggaran pelaksanaan program/kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2-25 sesuai dengan Rincian Anggaran dan Biaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rincian Anggaran dan Biaya Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

No.	Kegiatan/Rincian <i>Output</i>	Anggaran
1	2	3
A.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	Rp12.800.000.000,00
1.	958 – Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp10.975.500.000,00
2.	959 – Layanan Protokoler	Rp1.824.500.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran kegiatan serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi biro berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media adalah meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif. Sasaran tersebut selaras dengan komitmen reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah Nilai Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Pelayanan Informasi Publik. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan, kualitas, serta efektivitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh biro kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebesar 0,9. Penetapan target ini menunjukkan upaya berkelanjutan Biro Protokol, Humas, dan Media dalam meningkatkan transparansi, akurasi, serta kemudahan akses informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi resmi. Hasil pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun pengukuran kinerja sasaran kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif	Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik (K ₃₁₁₆)	0,9	0,9	100%	Tercapai
----	---	--	-----	-----	------	----------

Tabel pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja serta bahan perumusan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

Target kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang mendukung keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas keprotokolan. Layanan tersebut terdiri atas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang mencakup 27 jenis layanan, serta Layanan Protokoler yang mencakup 1 jenis layanan. Seluruh layanan ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, informatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.2. Layanan Pendukung Pencapaian Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media

No.	Sasaran Kegiatan	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27 layanan	Pendukung keterbukaan informasi publik
2.	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif	Layanan Protokoler	1 layanan	Pendukung kegiatan keprotokolan
Total			28 layanan	

2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung keberhasilan. Faktor utama yang berkontribusi positif antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik, tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarunit kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi resmi secara optimal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan, serta responsivitas dalam pengelolaan informasi dan permintaan publik turut mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, dukungan pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi juga menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas layanan. Biro Protokol, Humas, dan Media mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi yang dinamis melalui penyediaan konten yang informatif, akurat, dan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional, nilai capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, khususnya dalam aspek pelayanan informasi publik. Capaian tersebut berada pada kategori baik dan kompetitif dibandingkan rata-rata capaian nasional, serta mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbandingan ini menjadi indikator bahwa kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berada pada jalur yang tepat, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

Namun begitu, dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media juga menemui beberapa hambatan, yaitu:

- a. Hambatan Struktural & Kelembagaan;
 - Birokrasi berlapis yang menyebabkan proses persetujuan informasi dan tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu lebih lama sehingga respons ke publik menjadi lambat.

- Tumpang tindih kewenangan antar unit kerja dan belum adanya layanan satu pintu.
- b. Hambatan Regulasi & Kebijakan;
- Interpretasi aturan yang berbeda-beda antar pejabat atau unit.
 - Belum tersedianya klasifikasi informasi (terbuka, terbatas, dan dikecualikan) yang mutakhir.
 - Belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Jumlah SDM terbatas dibandingkan beban kerja dan tuntutan kecepatan layanan informasi.
 - Kompetensi komunikasi publik belum merata, terutama dalam pengelolaan media sosial, manajemen isu dan krisis, pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat).
 - *Mindset* internal yang belum adaptif terhadap keterbukaan dan era digital.
- d. Hambatan Teknis & Teknologi
- Infrastruktur TIK belum memadai (*website* lambat dan sistem PPID tidak terintegrasi).
 - Pengelolaan data dan arsip belum rapi, sehingga sulit menyajikan informasi secara cepat dan akurat.
 - Kurangnya pemanfaatan analitik media dan *media monitoring*.
- e. Hambatan Koordinasi & Alur Informasi
- Informasi dari unit lain yang terkait terlambat atau tidak lengkap.
 - Kurangnya komunikasi internal/antarunit kerja.
 - Perbedaan narasi antarunit yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
- f. Hambatan Dinamika Media & Publik
- Tuntutan kecepatan media dan media sosial sering tidak sejalan dengan ritme birokrasi.

- Misinformasi dan disinformasi yang cepat menyebar sebelum klarifikasi resmi keluar.
- Ekspektasi publik yang tinggi terhadap transparansi dan interaksi dua arah.

g. Hambatan Anggaran

- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta produksi konten kreatif dan multimedia

3. Capaian Rencana Kerja

Berdasarkan hasil evaluasi Sekretariat Jenderal DPD RI – LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Portal Reformasi Birokrasi (RB) skor *index* untuk Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan adalah 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Rencana Kerja Biro Protokol, Humas, dan Media pada periode pelaporan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,9. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan Perjanjian Kinerja, khususnya dalam mendukung meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif.

Keberhasilan pencapaian nilai 0,9 tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan rencana kerja yang terarah, terukur, dan konsisten dengan Perjanjian Kinerja. Seluruh kegiatan kehumasan, pengelolaan informasi publik, media, serta layanan keprotokolan dilaksanakan sesuai dengan rencana, jadwal, dan standar pelayanan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun telah selaras dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik. Capaian ini juga mencerminkan konsistensi Biro Protokol, Humas, dan Media dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan tercapainya target Rencana Kerja tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media telah berkontribusi secara signifikan dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Capaian ini sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai serta mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun capaian Rencana Kerja Biro Protokol, Humas, dan Media 2025 nantinya akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Rencana Kerja Biro Protokol, Humas, dan Media

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif	Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik (K ₃₁₁₆)	0,9	0,9	100%	Tercapai

Hasil tersebut akan menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus pijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media merupakan wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi biro secara optimal. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup layanan keprotokolan, kehumasan, serta pengelolaan media yang berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pimpinan, penyampaian informasi kepada publik, dan penguatan citra institusi.

Pengelolaan dan realisasi anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui realisasi anggaran ini diharapkan seluruh kegiatan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan informasi publik.

Realisasi anggaran Biro Protokol, Humas, dan Media sesuai dengan PAGU anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025

No.	Kegiatan/Rincian <i>Output</i>	Kinerja		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
A.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	12.800.000.000	12.465.311.466	97,39%
1.	958 – Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.975.500.000	10.873.148.703	99,07%
2.	959 – Layanan Protokoler	1.824.500.000	1.592.162.763	87,27%

C. Tahapan dan Langkah-langkah Pencapaian Target 2025

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Biro Protokol, Humas, dan Media menetapkan tahapan khusus pencapaian target Tahun 2025 secara terukur dan berkelanjutan melalui beberapa program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	<i>Output/Bukti Dukung</i>
1.	Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan dan SP4N LAPOR! Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Januari s.d. April 2025	Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan dan SP4N LAPOR! Sekretariat Jenderal DPD RI.
2.	Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Sekretariat Jenderal DPD RI	26 Februari 2025	Notulen.

	dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.		
3.	Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 658 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Setjen DPD RI.	19 Mei 2025	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 658 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Setjen DPD RI.
4.	Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan SP4N LAPOR Setjen DPD RI.	22 Mei 2025 dan 24 Juni 2025	SOP Pengelolaan SP4N LAPOR Setjen DPD RI.
5.	Konsultasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	10 Juni 2025	Notulen.
6.	Reviu atas SK No. 1115 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sekretariat Jenderal DPD RI.	24 Juni 2025	Notulen rapat.
7.	Sosialisasi SP4N LAPOR! di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.	7 s.d. 9 Agustus 2025	Notulen.
8.	Sosialisasi SP4N LAPOR! untuk eksternal pada kegiatan Penerimaan Kunjungan Delegasi ke DPD RI.	16, 17, dan 18 September 2025	Foto kegiatan.
9.	Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! melalui penyusunan Laporan Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N LAPOR!	Desember 2025	Laporan Tahunan Pengelolaan SP4N LAPOR! 2025.
10.	Publikasi rekap pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR!	Triwulan IV	Infografis/bahan publikasi.

	tahun 2025 di media sosial dan <i>website</i> PPID DPD RI.	
--	--	--



Gambar 3.1. Sosialisasi SP4N LAPOR! untuk eksternal pada kegiatan Penerimaan Kunjungan Delegasi ke DPD RI



Gambar 3.2. Publikasi rekap pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR! tahun 2025 di media sosial (Instagram) PPID DPD RI.

D. Perbandingan Capaian 2024 dengan 2025

Capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2024, baik dari sisi kualitas layanan, efektivitas komunikasi publik, maupun penguatan tata kelola internal. Perbandingan ini mencerminkan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa Biro Protokol, Humas, dan Media telah bergerak menuju organisasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kinerja. Peningkatan yang dicapai pada Tahun 2025 menjadi landasan penting untuk memperkuat peran strategis biro dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel di masa mendatang.

Target indikator pada sasaran kegiatan Meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif Biro Protokol, Humas, dan Media tahun 2025 adalah sebesar 0,9. Dengan target sebesar 0,9, sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja Nilai Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025. Nilai tersebut diambil dari hasil evaluasi/nilai indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Pada tahun 2024, Biro Protokol, Humas, dan Media menargetkan nilai indikator kinerja ini dengan nilai yang sama, yaitu sebesar 0,9 dan telah berhasil mencapai target tersebut. Dengan beberapa pertimbangan, target yang sama ditetapkan untuk tahun 2025 dan sesuai hasil evaluasi Sekretariat Jenderal DPD RI – LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Portal Reformasi Birokrasi (RB) skor *index* untuk Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan adalah 0,9, sehingga perbandingan capaian target antara tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian 2024	Capaian 2025	Perbandingan	Keterangan
0,9	0,9	100%	Stabil

E. Hasil Kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Program Tahun 2025

1. Bagian Protokol

a. Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPD RI

Pelayanan keprotokolan kegiatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berada di bawah koordinasi Kepala Subbagian Acara dan Upacara. Bentuk pelayanan keprotokolan berupa pendampingan terhadap Pimpinan DPD RI dalam setiap kegiatan, baik di dalam negeri (Ibu Kota Negara maupun di daerah seluruh Indonesia), seperti kunjungan kerja ke daerah, menghadiri undangan pelantikan di Istana Negara, seminar/lokakarya, peresmian gedung, undangan organisasi masyarakat/ keagamaan, peringatan hari kemerdekaan negara sahabat, maupun kegiatan luar negeri, seperti studi referensi, misi muhibah, kunjungan resmi Kepala Negara/Parlemen Luar Negeri, dan lain-lain.



Pelayanan keprotokolan kegiatan Pimpinan DPD RI, secara khusus diberikan kepada Pimpinan DPD RI (Ketua DPD RI, Wakil Ketua I DPD RI, Wakil Ketua II DPD RI, dan Wakil Ketua III DPD RI), Pimpinan Alat Kelengkapan, dan Pimpinan

Sekretariat Jenderal DPD RI (Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, dan Deputi Bidang Persidangan). Selama tahun 2025, pendampingan keprotokolan terhadap Kegiatan Pimpinan DPD RI telah dilakukan pada sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7. Jumlah kegiatan pendampingan keprotokolan terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI tahun 2025

No.	Pimpinan	Jumlah Kegiatan
1.	Ketua DPD RI	123
2.	Wakil Ketua I DPD RI	27
3.	Wakil Ketua II DPD RI	14
4.	Wakil Ketua III DPD RI	149
5.	Pimpinan Sekretariat Jenderal	14
	Total	327

b. Pelayanan Persidangan

Pelayanan Persidangan berupa dukungan keprotokolan dalam persidangan, meliputi sidang bersama DPR-DPD RI, sidang tahunan MPR RI, sidang paripurna RAPBN, sidang pelantikan anggota DPR-DPD-MPR RI, pelantikan Presiden/Wakil Presiden, rapat Pimpinan, rapat Panitia Musyawarah, Sidang Paripurna/Sidang Paripurna Luar Biasa/Sidang Paripurna Khusus, rapat gabungan/rapat kerja/rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum/rapat koordinasi/rapat Sekretariat Jenderal, serta layanan persidangan lainnya. Pada periode ini, pendampingan keprotokolan terhadap kegiatan pelayanan persidangan telah dilakukan sebanyak 76 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8. Jumlah kegiatan pendampingan keprotokolan kegiatan Persidangan DPD RI tahun 2025

No.	Pimpinan	Jumlah Kegiatan
1.	Komite I	6
2.	Komite II	8
3.	Komite III	10

4.	Komite IV	3
5.	Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	3
6.	Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)	2
7.	Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)	6
8.	Badan Kehormatan (BK)	-
9.	Badan Kerja Sama Parlemen	11
10.	Badan Akuntabilitas Publik (BAP)	3
11.	Panitia Musyawarah	24
	Total	76

c. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu

Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu berupa dukungan dalam bentuk tata tempat dan tata penghormatan penerimaan tamu terhadap tamu negara, tamu pemerintah atau tamu/delegasi lembaga lainnya, dan tamu organisasi masyarakat. Pada tahun 2025, pendampingan keprotokolan terhadap kegiatan pelayanan keprotokolan penerimaan tamu bagi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI telah dilakukan sebanyak 11 pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9. Jumlah kegiatan pendampingan keprotokolan pada penerimaan tamu DPD RI tahun 2025

No.	Tamu Negara	Tanggal Kegiatan
1.	Republik Ceko	14 Mei 2025
2.	Arkansas	14 Mei 2025
3.	Kerajaan Spanyol	20 Juni 2025
4.	Republik Korea	24 Juni 2025
5.	Republik Singapura	30 Juni 2025
6.	Republik Rakyat Tiongkok	14 Oktober 2025
7.	Georgia	3 November 2025
8.	Republik Rakyat Tiongkok	25 November 2025
9.	Republik Bulgaria	2 Desember 2025
10.	Federasi Rusia	2 Desember 2025
11.	Republik Rakyat Tiongkok	3 Desember 2025

d. Pelayanan Keprotokolan Upacara

Pelayanan keprotokolan upacara berupa pengaturan tata tempat dan tata upacara pada kegiatan pelantikan anggota DPD RI terpilih, pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW), upacara persemayaman/penghormatan terakhir, upacara pelantikan pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI serta penyelenggaraan upacara bendera di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pada periode ini, pendampingan keprotokolan terhadap kegiatan pelayanan keprotokolan upacara bagi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI telah dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, yaitu 2 (dua) kegiatan pelantikan dan 15 (lima belas) kegiatan upacara bendera Hari Besar Nasional.



e. Pelayanan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Pelayanan PDLN diberikan kepada pimpinan dan anggota DPD RI serta pejabat dan pegawai sekretariat jenderal DPD RI dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri berupa pengurusan administrasi surat persetujuan (SP) dari sekretariat negara RI dan pengurusan paspor diplomatik (Pimpinan), paspor dinas (Anggota DPD RI dan pejabat/pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI), *exit permit* dan rekomendasi visa dari Kementerian Luar Negeri RI serta pengurusan visa di Kedutaan Besar Negara Sahabat/pihak ketiga yang ditunjuk resmi oleh Kedutaan Besar. Pelayanan pengurusan PDLN saat ini berada di Subbagian Administrasi Keprotokolan, Bagian Protokol.

Pada periode ini, Bagian Protokol telah melakukan pengurusan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 27 (dua puluh tujuh) perjalanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Jumlah Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) DPD RI tahun 2025

No.	Pimpinan	Jumlah Dokumen/Perjalanan
1.	Pimpinan DPD RI	13
2.	Anggota DPD RI	24
3.	Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI	26
	Total	63

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan pengurusan PDLN, Bagian Protokol telah menyusun dan menerbitkan 5 (lima) buah SOP (Standar Operasional Prosedur), yaitu:

- i. SOP Pengurusan Surat Persetujuan (SP) Perjalanan Dinas Luar Negeri Sekretariat Negara, dengan Nomor SOP DPD-07.03.CFM.02.SOP.01.MI.01.
- ii. SOP Pengurusan Paspor Diplomatik/Dinas, Exit Permit dan Rekomendasi Visa, Kementerian Luar Negeri, dengan Nomor SOP DPD-07.03.CFM.02.SOP.01.MI.02.
- iii. SOP Pengurusan Visa Kedutaan Besar, dengan Nomor SOP DPD-07.03.CFM.02.SOP.01.MI.03.
- iv. SOP Penyerahan Kembali Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) ke Bagian Protokol, dengan Nomor SOP DPD-07.03.CFM.02.SOP.01.MI.04.
- v. SOP Peminjaman Dokumen Perjalan Dinas Luar Negeri (PDLN), dengan Nomor SOP DPD-07.03.CFM.02.SOP.01.MI.05.

f. Pelayanan Keprotokolan di Bandar Udara Ibu Kota Negara

Bagian Protokol memiliki 11 (sebelas) orang petugas yang ditempatkan di bandar udara ibu kota negara (Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma) dan bertugas 24 jam memberikan pelayanan kepada Pimpinan DPD RI dan Anggota DPD RI dalam bentuk *check in* dan *baggage handling*. Selain itu, untuk peningkatan terhadap pelayanan keprotokolan di bandar udara ibu kota provinsi, Bagian Protokol telah membuatkan ID *Pass* Bandara kepada pegawai

Sekretariat Jenderal yang berada di ibu kota provinsi. Pada tahun 2025, pelayanan keprotokolan di bandar udara ibu kota negara telah dilakukan sebanyak 2.723 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11. Jumlah pelayanan keprotokolan di bandar udara ibu kota negara tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan
1.	Januari	123
2.	Februari	253
3.	Maret	69
4.	April	104
5.	Mei	165
6.	Juni	97
7.	Juli	218
8.	Agustus	44
9.	September	556
10.	Oktober	245
11.	November	609
12.	Desember	240
	Total	2.723

Sementara itu, selama tahun 2025 Bagian Protokol juga telah membantu memfasilitasi pembuatan ID *Pass* Bandara di 8 (delapan) provinsi berikut ini:

Tabel 3.12. Jumlah pembuatan ID *Pass* Bandara tahun 2025

No.	Bandara/Provinsi	Jumlah ID <i>Pass</i> Bandara	Tanggal Berlaku
1.	Sulawesi Tenggara	6 orang	23 April 2026
2.	Kalimantan Tengah	2 Orang	2 Mei 2026
3.	Sumatera Utara	2 Orang	7 Juni dan 9 Juli 2026

4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	3 orang	Juni 2026 dan 7 Oktober 2026
5.	Bangka Belitung	2 orang	12 Juni 2026
6.	Sulawesi Tengah	2 Orang	1 Juli 2026
7.	Bandara Soekarno-Hatta	11 Orang	31 Oktober 2026
8.	Bali	3 orang	27 Oktober 2026

g. Hasil Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat DPD RI terhadap Bagian Protokol pada Tahun 2025

Untuk mengetahui sampai sejauh mana layanan yang dilakukan unit-unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI telah memberikan kepuasan bagi *internal user*, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan internal pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap layanan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Artinya, pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI di salah satu bagian (unit kerja) akan menilai layanan yang diberikan oleh bagian lain yang secara khusus memberikan layanan terhadap pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dengan diketahuinya tingkat kepuasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka Sekretariat Jenderal DPD RI dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pengolahan survei pada Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media menunjukkan data sebagai berikut:

- i. Jumlah data atau agregat bobot pengukuran: 1.481
- ii. Banyak data agregat jumlah pertanyaan per Biro/Pusat yang dijawab: 324
- iii. Tingkat Kepuasan $1.481/324 = 4,57$ (Sangat Puas)

Berdasarkan pengolahan data terhadap 36 responden yang mewakili Alat Kelengkapan, Pelayanan Pimpinan, serta unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi, diperoleh gambaran performa layanan Bagian Protokol sebagai berikut:

- i. Capaian Positif: Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian SANGAT PUAS terhadap aspek-aspek fundamental keprotokolan. Hal ini mencakup profesionalisme dan sikap petugas di

lapangan, ketertiban penyelenggaraan acara strategis (seperti Sidang Paripurna dan Pelantikan), serta efektivitas koordinasi dengan instansi luar. Selain itu, layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri juga dinilai telah berjalan dengan sangat baik, sistematis, dan responsif.

- ii. Catatan dan Umpan Balik Perbaikan: Meskipun secara umum indeks kepuasan berada pada kategori sangat baik, terdapat beberapa poin spesifik yang menjadi catatan dan memerlukan atensi strategis dari manajemen Bagian Protokol guna penyempurnaan di masa mendatang:
 - Peningkatan kapasitas bahasa asing: Beberapa responden memberikan umpan balik agar petugas protokol yang melakukan pendampingan internasional terus ditingkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing (terutama Bahasa Inggris) untuk memastikan komunikasi yang lebih lancar dengan protokol negara mitra.
 - Kecepatan antisipasi perubahan di lapangan: Terdapat masukan mengenai pentingnya peningkatan kapasitas petugas dalam mengantisipasi perubahan jadwal atau situasi mendadak yang dinamis (*contingency plan*) saat kunjungan kerja atau rapat-rapat alat kelengkapan di daerah.
 - Optimalisasi inisiatif: Responden menyarankan agar personel protokol dapat lebih proaktif dan memiliki inisiatif tinggi dalam memberikan solusi teknis di lapangan tanpa selalu menunggu instruksi berjenjang, terutama dalam situasi yang mendesak.

2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan

Sebagai jembatan komunikasi antara DPD RI dan Publik serta dalam rangka memperkuat citra lembaga, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan pada tahun 2025 menyelenggarakan beberapa program kegiatan sebagai berikut:

a. Penerimaan Delegasi

Sepanjang tahun 2025, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan telah menerima kunjungan delegasi dari 55 instansi dengan jumlah peserta sebanyak 3.207 orang. Jumlah penerimaan delegasi ini meningkat jika

dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya yaitu 45 instansi dengan jumlah peserta 2.561 orang.

Daftar instansi yang berkunjung ke DPD RI dan diterima oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

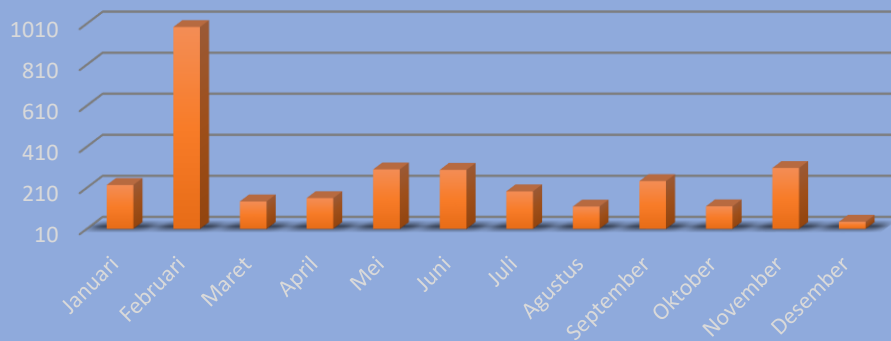
Tabel 3.13. Jumlah kunjungan delegasi ke DPD RI tahun 2025

Bulan	Instansi	Jumlah Peserta (*orang)
Januari	• Universitas Muhammadiyah Ponorogo	34
	• SMP Islam Tiara Aksara, Kota Tangerang	120
	• Universitas Achmad Yani, Cimahi	20
	• MAN 4 Jakarta	50
Februari	• Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang	82
	• SMA Negeri 1 Gresik	75
	• Delegasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu	158
	• Politeknik Krakatau, Kota Cilegon	110
	• SDIT Al-Mumtaz, Pontianak	50
	• SMK Negeri 1 Denpasar	301
	• SMP Muhammadiyah 8 Jakarta	100
	• Institut Kesehatan Immanuel Bandung	28
	• SD Islam Hobihobi, Bekasi	35
	• SMP Laboratorium Jakarta	55
Maret	• DPRD Kabupaten Kepahiang	6
	• Delegasi Universitas Marmadewa Bali (Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana)	55
	• Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)	80
	• DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	3
April	• SMA Negeri 1 Jakarta	100
	• SMP Negeri 182 Jakarta	60
Mei	• Universitas Muhammadiyah Jakarta	120
	• SMK Negeri 56 Jakarta	60
	• SD Negeri Bendungan Hilir 01	120
Juni	• Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto	180

	• Universitas Ibnu Chaldun Jakarta	60
	• SMA N Model Terpadu Madani Palu	38
	• DPRD Kabupaten Malinau	20
Juli	• Komunitas Daraa Creative Indonesia	30
	• KOMIK Universitas Al Azhar Indonesia	40
	• SMP Negeri 57 Jakarta	30
	• DPRD Kota Bandung	13
	• Bundo Kandung, Tanah Datar	20
	• DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	5
	• SMPN 257 Jakarta	55
Agustus	• DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	4
	• SDN Sukabumi Selatan 01	115
September	• Universitas Airlangga	60
	• DPRD Kabupaten Kepahiang	4
	• Universitas Negeri Surabaya	119
	• Universitas Brawijaya	60
Oktober	• UPN Veteran Jakarta	60
	• DPRD Provinsi Jambi	6
	• SMPIT Insan Cendekia Bandar Lampung	42
	• DPRD Kabupaten Kepahiang	1
	• Universitas Diponegoro	7
	• DPRD Kabupaten Kepahiang	4
November	• Tim Media dan Content Creator Provinsi Sumatera Selatan	15
	• BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia (BEM PTMA)	100
	• SMPIT Pondok Pesantren Modern Daarul Ijabah Jambe, Banten	40
	• DPRD Bengkulu Selatan	2
	• BEM Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia	100
	• Universitas Kristen Satya Wacana	50
Desember	• DPRD Provinsi Jawa Barat	7
	• DPRD Kabupaten Sijunjung	8
	• SMP Sumbangsih Jakarta	30

Adapun gambaran jumlah kunjungan delegasi ke DPD RI Tahun 2025 tergambar dalam grafik berikut:

GRAFIK DATA KUNJUNGAN DELEGASI KE DPD RI



Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Delegasi 2025



Gambar 3.7. Kunjungan Ketua DPRD Kota Kepahiang, Provinsi Bengkulu (16/9/2025)



Gambar 3.8. Kunjungan Delegasi Mahasiswa Universitas Surabaya, Jawa Timur (17/9/2025)



Gambar 3.9. Kunjungan Delegasi Protokol Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat (2/12/2025)

b. Pembuatan Videografis dan Infografis

Sebagai unit kerja pengelola media sosial, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan tidak dapat terlepas dari kegiatan pembuatan videografis dan infografis. Videografis dan infografis tersebut diunggah ke Instagram, Facebook, Tiktok, X (Twitter), dan Youtube. Selama tahun 2025 telah dibuat sebanyak **2.262** video dan infografis yang di-*upload* di berbagai Media Sosial DPD RI. Berikut merupakan rekapitulasi videografis dan infografis yang dihasilkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan selama tahun 2025:

Tabel 3.14. Jumlah kunjungan delegasi ke DPD RI tahun 2025

Bulan	Jumlah Produksi Videografis dan Infografis
Januari	267
Februari	281
Maret	138
April	181
Mei	199
Juni	186
Juli	164
Agustus	213
September	146

Oktober	196
November	173
Desember	118
TOTAL	2.262



c. Pengelolaan Media Sosial

Pengelolaan media sosial arus utama berperan sebagai kanal resmi yang menjembatani lembaga dengan publik secara cepat, luas, dan interaktif. Media sosial memungkinkan DPD RI menyampaikan informasi terkait kegiatan legislatif, dan mendengarkan aspirasi publik secara *real-time* sekaligus membuka ruang dialog dua arah yang sebelumnya terbatas pada kanal komunikasi konvensional. Melalui media sosial, DPD RI dapat membangun citra positif lembaga, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan pesan kelembagaan tersampaikan secara konsisten dan efektif lewat penyajian konten yang informatif, transparan, dan partisipatif agar dapat dijadikan sebagai rujukan utama informasi publik yang kredibel dan terpercaya.

Berikut adalah media sosial DPD RI:

- i. Instagram: @DPDRI
- ii. Twitter: @DPDRI
- iii. Facebook: DPD RI
- iv. Tiktok: @Kabarsenator
- v. Youtube: DPD RI

Dalam pengelolaan media sosial juga dilakukan monitoring serta evaluasi agar media sosial DPD RI semakin baik. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan media sosial suatu lembaga merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas komunikasi publik dan pencapaian tujuan kehumasan. Monitoring berfungsi untuk mengamati secara berkelanjutan aktivitas, interaksi, serta respons audiens terhadap konten yang dipublikasikan. Hal ini membantu lembaga memahami tren, isu yang berkembang, serta tingkat keterjangkauan pesan. Ringkasan hasil monitoring yang dapat disajikan di antaranya adalah sebagai berikut:

Jumlah Publikasi

- Youtube: 20 publikasi
- X (Twitter): 405 publikasi
- Instagram: 827 publikasi
- Facebook: 558 publikasi
- Website: 452 publikasi



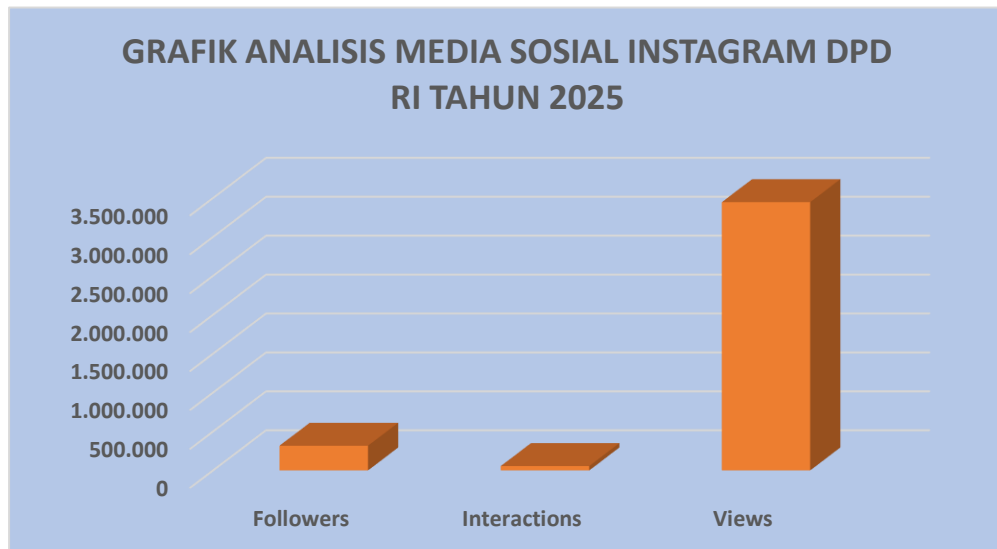
Analisis Media Sosial

- Instagram:

Followers: 317.000

Interactions dalam 3 bulan terakhir: 56.004

Views/Penayangan dalam 3 bulan terakhir: 3.446.219

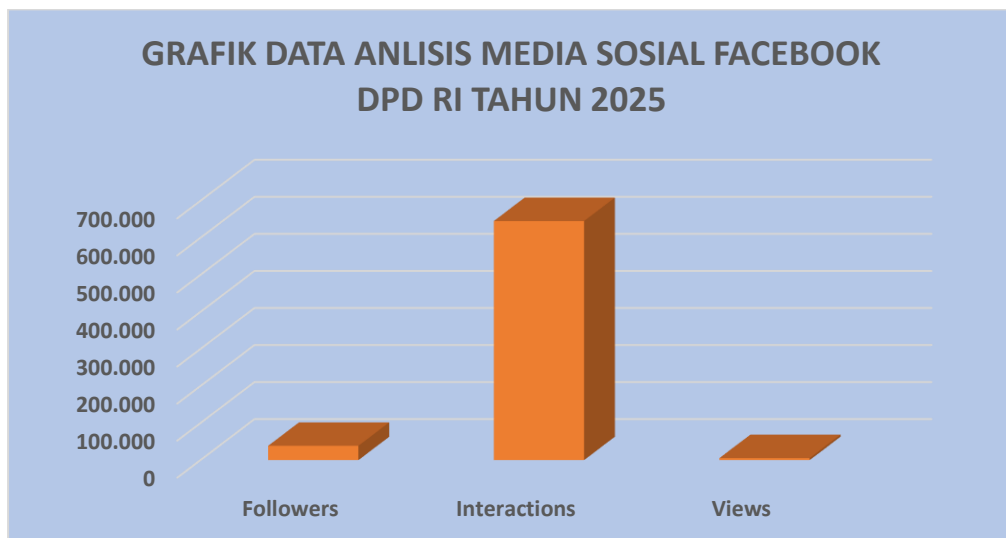


- Facebook:

Followers: 38.586

View/Reach dalam 3 bulan terakhir: 645.250

Interactions dalam 3 bulan terakhir: 5.440



d. Peliputan Media Sosial

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2025 Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan telah melakukan peliputan media sosial untuk kegiatan-kegiatan DPD RI maupun Sekretariat Jenderal DPD RI sebanyak 410 kali. Naik dari Tahun 2024 sebanyak 315 kali dan Tahun 2023 yang hanya sebanyak 257 kali atau Tahun 2022 sebanyak 172 kali. Permintaan yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa diseminasi informasi melalui media sosial saat ini penting

untuk dilakukan dan merupakan platform yang efektif untuk menyebarkan informasi.



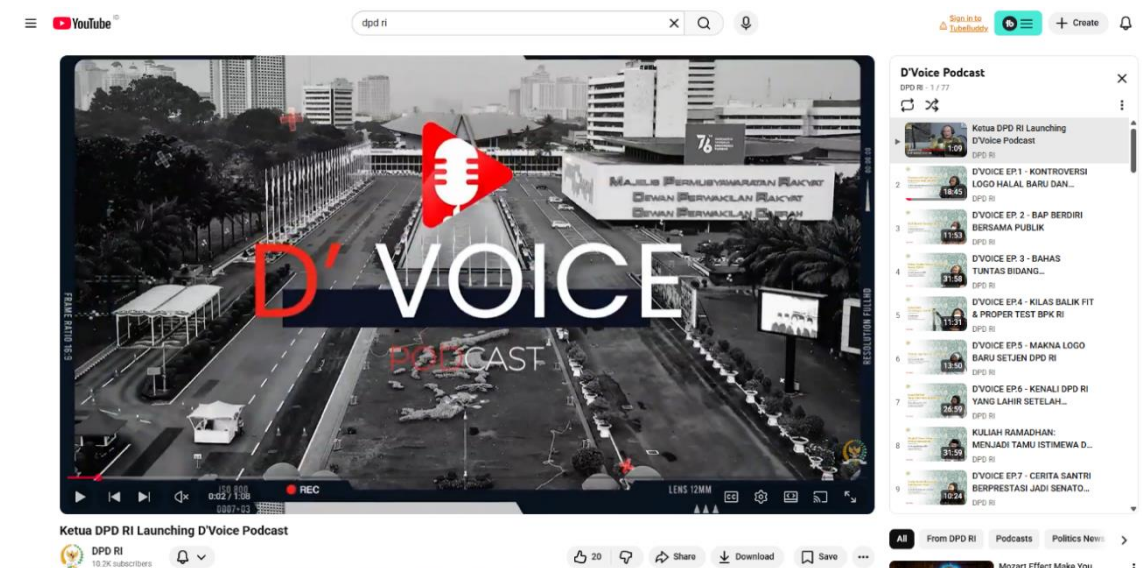
e. Penyelenggaraan *Podcast*

Pada tahun 2025, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan telah memproduksi 10 (sepuluh) episode *Podcast* sebagai berikut:

Tabel 3.15. Penyelenggaraan *Podcast* DPD RI Tahun 2025

No.	Judul Podcast	Narasumber	Tanggal Tayang	Jumlah Views
1.	Maraknya <i>Skincare</i> Bermasalah, Konsumen Harus Cerdas!	dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed. (Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah)	30 Januari 2025	162
2.	Senator Muda Dari Malut Siap Kawal Isu Sumber Daya Alam	Dr. Riedno <i>Graal Taliawo</i> , S.Sos., M.Si. (Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara)	3 Februari 2025	295
3.	Senator Syauqi Ingin Memastikan Ruang Kreatif Tumbuh	Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. (Anggota DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	10 Februari 2025	214
4.	Senator Lia Ajak Publik Kawal Program Makan Bergizi Gratis	Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I. (Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur)	11 Februari 2025	427

5.	Senator Matias Komitmen Bawa Isu Pendidikan ke DPD RI	Matias Heluka, S.H., M.H. (Anggota DPD RI Provinsi Papua Pegunungan)	17 Februari 2025	387
6.	Senator Erni Minta Pemerintah Beri Atensi Lebih Terkait Gas LPG 3 kg	dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed. (Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah)	19 Februari 2025	407
7.	Senator Lia Ajak Publik Tanamkan Nilai Nasionalisme	Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I. (Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur)	24 Februari 2025	595
8.	Tantangan Pembentukan Daerah Otonom Baru	Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N. (Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur)	7 November 2025	381
9.	Jembatan Suara Muda melalui Duta DPD RI Menyuarakan Aspirasi untuk Negeri	Irhamni Malika (Juara I Duta DPD RI 2025)	12 November 2025	196
10.	Trans Papua dan Pembangunan Papua dari Perspektif Senator Agustinus	Agustinus R. Kambuaya, S.I.P. (Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Daya)	9 Desember 2025	222



Gambar 3.10. Ilustrasi Podcast D’Voice yang tayang di akun Youtube @DPD RI produksi tahun 2025

f. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2025 PPID DPD RI telah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Tahun 2025, PPID Sekretariat DPD RI dalam Monev KIP berhasil meraih predikat INFORMATIF dengan perolehan nilai sebesar 98,11 yang merupakan capaian tertinggi PPID Sekretariat Jenderal DPD RI selama 5 tahun terakhir. Hasil monev ini menunjukkan komitmen PPID DPD RI dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pembenahan dan inovasi di berbagai aspek.



Gambar 3.11. Sekretaris Jenderal DPD RI H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.M. didamping Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Mahyu Darma, S.H., M.H. mengikuti Uji Publik (19/11/2025)



Gambar 3.12. Sekretaris Jenderal DPD RI H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.M. menerima penghargaan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan Predikat 'Informatif' (22/12/2025)

g. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)

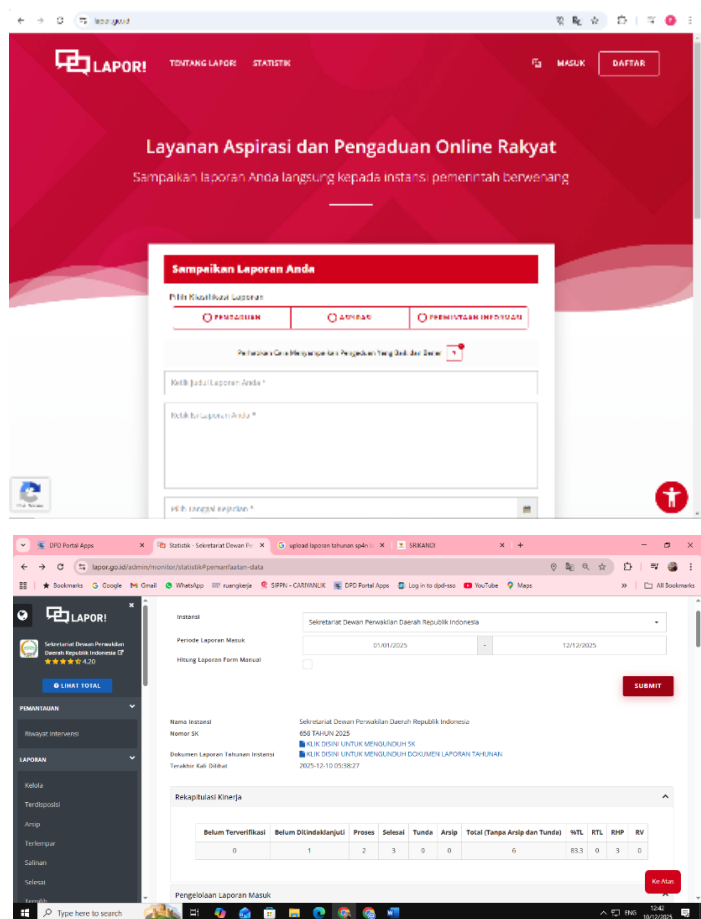
Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (lapor.go.id) oleh Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan wujud komitmen lembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan kanal resmi pengaduan, pendampingan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta tindak lanjut laporan secara sistematis sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui integrasi dengan sistem nasional, pengaduan masyarakat dapat ditangani secara lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas instansi.

Berikut rekapitulasi pengaduan melalui Web LAPOR! Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2025:

Tabel 3.16. Rekapitulasi pengelolaan pengaduan melalui LAPOR! Tahun 2025

No.	Laporan Terdisposisi	Jumlah
1	Laporan Belum terverifikasi	0
2	Terdisposisi Belum ditindaklanjuti	1
3	Terdisposisi Sedang diproses	2
4	Terdisposisi Selesai	3

5	Tertunda	1
6	Arsip	5
Total (Tanpa Arsip dan Tunda)		6



Gambar 3.13. Tangkapan layer tampilan *website* lapor.go.id

h. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik merupakan salah satu wujud nyata komitmen instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Pengaduan memiliki peran penting dalam memberikan layanan kunjungan delegasi serta pelayanan pemberian informasi. Untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang objektif. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja dan kualitas pelayanan.

Survei ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sekaligus sebagai bahan evaluasi internal bagi Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan dalam meningkatkan mutu layanan.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* (Google Form) yang *link*-nya disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025, Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan telah mengadakan SKM untuk pelayanan publik yang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang “Baik” dengan nilai SKM 84,85 (Kategori Baik).

3. Bagian Pemberitaan dan Media

a. Peliputan Kegiatan DPD RI

Tugas peliputan kegiatan DPD RI yang dilakukan meliputi dokumentasi dan pelaporan seluruh aktivitas resmi DPD RI, baik di dalam maupun di luar kantor. Peliputan tersebut mencakup kegiatan Pimpinan, Anggota, dan alat kelengkapan DPD RI seperti rapat kerja, kunjungan daerah, pertemuan dengan *stakeholder*, serta kegiatan konstitusional lainnya.

Hasil peliputan kemudian diolah menjadi berbagai bentuk publikasi, seperti siaran pers, berita, artikel, atau konten digital yang disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, dan digital. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa setiap aktivitas DPD RI dapat diinformasikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan efektif. Pada tahun 2025, terdapat 158 pelayanan peliputan kegiatan DPD RI yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16. Jumlah Pelayanan Peliputan Kegiatan DPD RI Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Peliputan Kegiatan
1.	Januari	9
2.	Februari	19

3.	Maret	12
4.	April	12
5.	Mei	25
6.	Juni	6
7.	Juli	13
8.	Agustus	11
9.	September	25
10.	Oktober	5
11.	November	14
12.	Desember	7
Jumlah		158

b. Produksi dan Penyebarluasan Siaran Pers

Produksi dan penyebarluasan siaran pers merupakan salah satu tugas utama Bagian Pemberitaan dan Media. Setelah melakukan peliputan, disusunlah siaran pers yang memuat informasi penting terkait kegiatan DPD RI, seperti hasil rapat, kunjungan kerja, pernyataan resmi Pimpinan, serta isu-isu strategis lainnya.

Siaran pers disusun dengan standar profesional agar pesan yang disampaikan jelas, akurat, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi lembaga. Selanjutnya, siaran pers disebarluaskan kepada berbagai media massa serta diunggah ke *platform* resmi DPD RI. Pada tahun 2025, terdapat 845 siaran pers yang diproduksi dan disebarluaskan. Selain itu, berdasarkan hasil *media monitoring*, terdapat 13.655 berita mengenai DPD RI yang berasal dari penyebaran siaran pers maupun hasil peliputan media secara independent, sebagaimana tercantum pada table berikut:

Tabel 3.17. Jumlah siaran pers yang diproduksi dan disebarkan ke media tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Siaran Pers
1.	Januari	49
2.	Februari	91
3.	Maret	38
4.	April	59

5.	Mei	71
6.	Juni	54
7.	Juli	60
8.	Agustus	75
9.	September	92
10.	Oktober	94
11.	November	91
12.	Desember	71
Jumlah		845

Tabel 3.18. Jumlah berita mengenai DPD di tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Artikel
1.	Januari	1.121
2.	Februari	1.261
3.	Maret	1.056
4.	April	994
5.	Mei	975
6.	Juni	968
7.	Juli	984
8.	Agustus	1.136
9.	September	1.203
10.	Oktober	1.121
11.	November	1.661
12.	Desember	1.175
Jumlah		13.655

c. Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Peliputan Wartawan

Bagian Pemberitaan dan Media bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan konferensi pers untuk menyampaikan informasi penting kepada

publik melalui media. Kegiatan ini mencakup penyiapan materi, koordinasi narasumber, serta pengaturan kehadiran wartawan.

Selain itu, Bagian Pemberitaan dan Media juga mendampingi wartawan dalam peliputan kegiatan DPD RI dan bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) guna memastikan kelancaran akses informasi.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 45 kegiatan konferensi pers maupun peliputan wartawan yang difasilitasi oleh Bagian Pemberitaan dan Media, yaitu:

Tabel 3.19. Jumlah penyelenggaraan konferensi pers dan peliputan wartawan tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Artikel
1.	Januari	4
2.	Februari	7
3.	Maret	2
4.	April	1
5.	Mei	7
6.	Juni	3
7.	Juli	6
8.	Agustus	4
9.	September	1
10.	Oktober	3
11.	November	4
12.	Desember	3
Jumlah		45

d. Pemantauan dan Pengelolaan Isu

Bagian Pemberitaan dan Media melakukan pemantauan rutin terhadap pemberitaan di berbagai media terkait DPD RI. Hasil pemantauan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren, sentimen, serta dampak pemberitaan terhadap citra lembaga.

Dari total 13.655 berita mengenai DPD RI pada tahun 2025, terdapat 1.568 berita bernada positif, 11.884 bernada netral, dan 203 bernada negatif. Media yang paling banyak mempublikasikan berita tentang DPD RI adalah tribunnews.com dengan 468 berita, setelah itu, pemberitaan didominasi oleh media lokal seperti beritalima.com, beritabuana.co, liputan.co.id, serta beberapa portal daerah lainnya yang turut berperan dalam menyebarkan informasi kegiatan dan isu terkait DPD RI.

Secara keseluruhan, eksposur pemberitaan DPD RI menunjukkan tren yang stabil dan informatif sepanjang tahun 2025 sebagaimana table berikut:

Tabel 3.20. Sebaran *tone* berita DPD RI tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Berita
1.	Netral	11.884
2.	Positif	1.568
3.	Negatif	203
Jumlah		13.655

e. Produksi dan Penyebaran Majalah Senator

Bagian Pemberitaan dan Media juga bertanggung jawab dalam produksi dan penyebaran Majalah Senator sebagai media informasi resmi mengenai kinerja DPD RI. Proses produksi meliputi perencanaan konten, penulisan artikel, desain layout, hingga distribusi majalah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pada tahun 2025, Majalah Senator diproduksi sebanyak 2 edisi setiap bulan dengan tema-tema yang relevan dengan isu terkini di daerah maupun agenda strategis DPD RI sebagaimana rincian berikut:

Tabel 3.21. Edisi dan Tema Majalah Senator tahun 2025

Bulan	Edisi dan Tema
Januari	▪ Edisi 1 : DOB kembali dipertanyakan ▪ Edisi 2 : Awasi Program MBG!

Februari	▪ Edisi 1 : Tenaga Honorer Terus Membengkak: Rekrutmen PPPK Makin Kisruh ▪ Edisi 2 : Jangan Pangkas Dana TKD
Maret	▪ Edisi 1 : Masalah Dikdasmen Makin Kompleks ▪ Edisi 2 : DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah Baru
April	▪ Edisi 1 : DPD RI Apresiasi Semangat Persatuan Umat Islam ▪ Edisi 2 : Darurat Sampah di Daerah
Mei	▪ Edisi 1 : Otonomi Daerah: Janji Yang Belum Tuntas ▪ Edisi 2 : Pengangguran Terus Meningkat
Juni	▪ Edisi 1 : Ketika Tambang Menebar Racun ▪ Edisi 2 : Empat Pulau Kembali Kepangkuan Aceh
Juli	▪ Edisi 1 : Pro Kontra Putusan MK: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah ▪ Edisi 2 : Tata Ruang Di Persimpangan Jalan
Agustus	▪ Edisi 1 : RAPBN 2026 Dana TKD Kembali Dipangkas ▪ Edisi 2 : DPD RI Dorong Pemerataan Pembangunan Daerah
September	▪ Edisi 1 : RAPBN 2026: Dana TKD Kembali Dipangkas ▪ Edisi 2 : Senator Peduli Ketahanan Pangan
Oktober	▪ Edisi 1 : 21 Tahun Kiprah DPD RI ▪ Edisi 2 : Janji Keadilan Dibalik SPMB 2025
November	▪ Edisi 1 : Meneguhkan Peran Daerah Merayakan 21 Tahun DPD RI ▪ Edisi 2 : Ketika “Raja” Menjadi Paling Rentan (Potret Baru Konsumen di Era Belanja Digital)
Desember	▪ Edisi 1 : RUU Daerah Kepulauan: Janji Yang Masih tertunda ▪ Edisi 2 : TKD Dipangkas; Otonomi Daerah di Ujung Tanduk

f. Kerja Sama Penayangan Program “Dari Kompleks Parlemen”

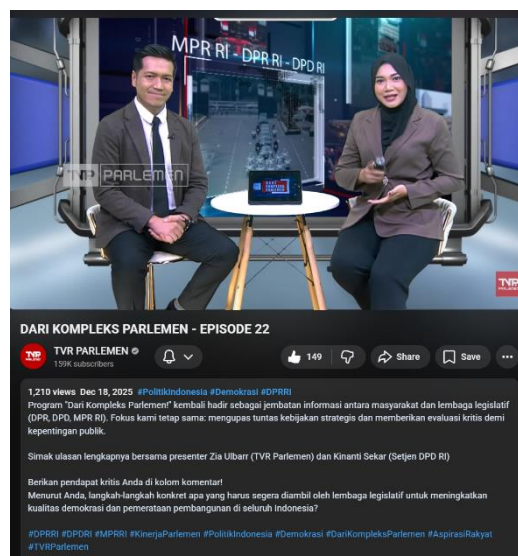
Pada tahun 2025, Bagian Pemberitaan dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI menjalin kerja sama strategis dalam penyelenggaraan program siaran televisi bertajuk “Dari Kompleks Parlemen.” Program ini merupakan bentuk sinergi komunikasi publik antara DPR RI dan DPD

RI dalam rangka menyampaikan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, serta peran kelembagaan parlemen kepada masyarakat luas.

Program “Dari Kompleks Parlemen” ditayangkan secara reguler melalui stasiun Televisi Parlemen (TVR) serta kanal resmi YouTube TVR, sehingga dapat menjangkau pemirsa secara lebih luas, baik melalui media televisi konvensional maupun platform digital. Selama tahun 2025, program ini berhasil diproduksi sebanyak 22 episode dengan total 66 kali penayangan, termasuk penayangan ulang (*rerun*) guna memperluas jangkauan audiens.

Dalam setiap episodenya, program ini menghadirkan berbagai informasi mengenai kinerja DPR RI dan DPD RI, pembahasan isu-isu strategis nasional dan daerah, serta dialog interaktif dengan narasumber dari unsur pimpinan dan anggota parlemen. Melalui format tayangan yang informatif dan edukatif, program ini menjadi salah satu sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi, tugas, serta kontribusi DPR RI dan DPD RI dalam kehidupan ketatanegaraan.

Kerjasama ini juga mencerminkan komitmen kedua publik untuk memperkuat transparansi, keterbukaan informasi publik, serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan keberlanjutan program “Dari Kompleks Parlemen,” diharapkan citra positif parlemen dapat semakin meningkat dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta berimbang mengenai aktivitas kelembagaan parlemen sepanjang tahun 2025.

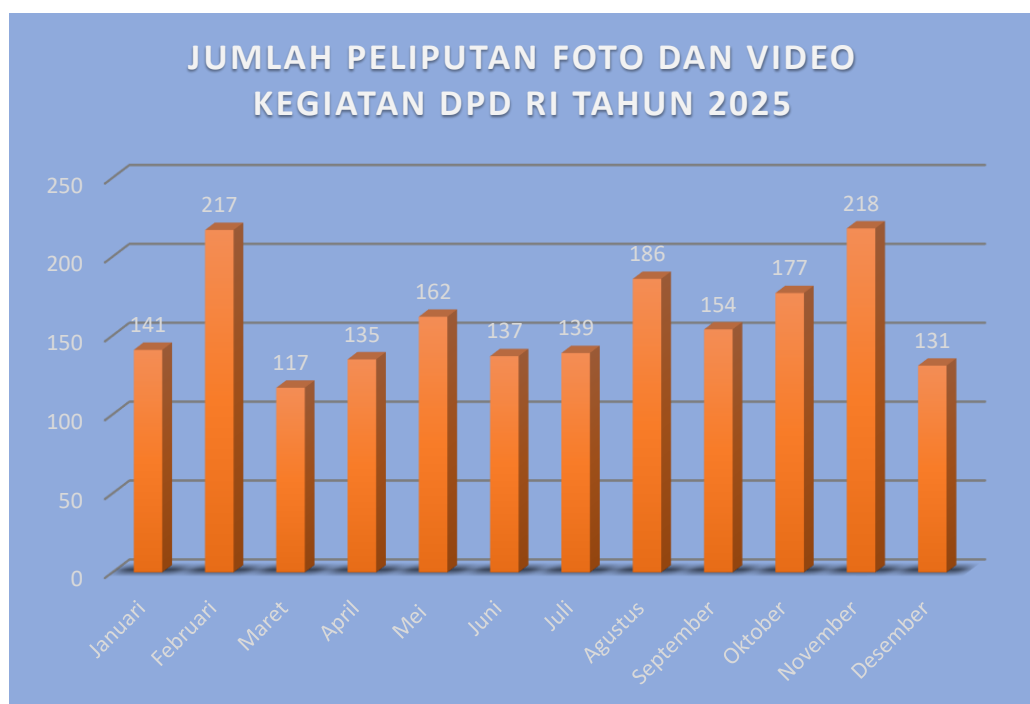


Gambar 3.13. Tayangan Program “Dari Kompleks Parlemen” di Kanal Youtube TVR Parlemen

g. Peliputan Foto dan Video kegiatan DPD RI

Bagian Pemberitaan dan Media juga memiliki tugas untuk melakukan peliputan foto dan video pada kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan kantor Sekretariat Jenderal DPD RI dengan output berupa dokumentasi kegiatan (foto dan video). Oleh karena itu, peranannya sangat penting dalam proses peliputan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran dokumen kinerja DPD RI berupa foto dan video.

Pada tahun 2025, terdapat 1.914 permintaan/pelayanan peliputan foto dan video untuk kegiatan DPD RI sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:



Selain kegiatan rapat dan audiensi yang berlangsung di dalam kompleks parlemen (gedung MPR/DPR/DPD RI), pendampingan peliputan foto dan video juga dilakukan untuk kegiatan di luar kantor dan di luar kota sesuai dengan agenda kegiatan. Selama tahun 2025, tercatat sebanyak 389 liputan di luar kantor dan 210 permintaan liputan untuk kegiatan di luar kota (daerah) seperti yang tergambar pada grafik berikut:



h. Penyajian Dokumentasi Digital/*Digital Signage*

Bertujuan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi DPD RI, Bagian Pemberitaan dan Media menjadikan kegiatan ini sebagai program yang memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat luas tanpa memandang waktu dan tempat. Adapun perwujudan program *Digital Signage* DPD RI dilakukan melalui media-media berikut ini:

i. Papan Informasi Digital

Tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro Protokol, Humas, dan Media berupaya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara menampilkan informasi kepada masyarakat menggunakan papan informasi digital yang diletakkan di tempat umum seperti stasiun, bandara, dan tempat lainnya yang memiliki *traffic* tinggi. Pada tahun 2025, papan informasi digital sudah terpasang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir dengan jumlah konten sebagai berikut:



ii. Media akrilik dan *tripod banner*

Program *Digital Signage* melalui media akrilik dan *tripod banner* ini menyediakan *QR Code* berisi kanal-kanal informasi kinerja DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang dapat diakses melalui *gadget* atau peralatan elektronik yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat setiap harinya dengan rekapitulasi jumlah pengunjung sebagaimana berikut:



iii. Pemanfaatan Videotron Pemerintah Daerah

Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, pada tahun 2025 Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui *Videotron* milik beberapa Pemerintah Daerah berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta;
- 2) Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) BP Batam – Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Provinsi Lampung;
- 5) Provinsi Bangka Belitung;
- 6) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7) Provinsi Jawa Timur;
- 8) Provinsi Riau;
- 9) Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Provinsi Aceh.

BAB IV

KESIMPULAN DAN UPAYA UNTUK TAHUN MENDATANG

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Biro Protokol, Humas, dan Media berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sasaran kegiatan berupa meningkatnya pelayanan informasi publik yang transparan dan informatif telah terwujud dengan baik, yang tercermin dari capaian Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pelayanan Informasi Publik sebesar 0,9, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah berjalan secara efektif dan terarah. Pelaksanaan layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta layanan Protokoler dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan akuntabilitas kinerja biro.

Secara umum, capaian kinerja Biro Protokol, Humas, dan Media telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan pada periode berikutnya, guna memenuhi tuntutan transparansi dan kebutuhan informasi publik yang semakin dinamis.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan Biro Protokol, Humas, dan Media telah berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi yang solid, perencanaan yang matang, serta dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini tercermin dari kelancaran pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan, efektivitas strategi kehumasan, serta optimalisasi pengelolaan media dalam mendukung penyampaian informasi kepada publik.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menunjukkan capaian yang memuaskan, baik dari sisi kualitas pelayanan, ketepatan waktu, maupun pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sinergi antarunit kerja serta komitmen seluruh jajaran Biro

Protokol, Humas, dan Media menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung citra institusi, kelancaran agenda pimpinan, serta peningkatan kualitas komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

B. Upaya dan Strategi untuk Tahun Mendatang

Berikut langkah-langkah dan upaya strategis yang akan dilakukan Biro Protokol, Humas, dan Media untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target pada tahun mendatang:

1. Penguatan Perencanaan dan Penetapan Target Kinerja

Menyusun rencana kerja dan Perjanjian Kinerja yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi serta kebutuhan pemangku kepentingan. Indikator kinerja perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dan mampu menggambarkan kualitas pelayanan informasi publik secara komprehensif.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kehumasan, pengelolaan media, komunikasi publik, keprotokolan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan kapasitas SDM diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Digital

Mengembangkan dan mengoptimalkan kanal informasi resmi, seperti website, media sosial, dan platform digital lainnya, guna memperluas jangkauan informasi publik serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyampaian informasi kepada masyarakat.

4. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan

Melakukan evaluasi dan pembaruan SOP layanan Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Protokoler secara berkala agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan layanan dan regulasi, serta menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antarunit Kerja

Meningkatkan koordinasi internal dan kolaborasi dengan unit kerja terkait serta pemangku kepentingan eksternal untuk memastikan keselarasan informasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.

6. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan, melakukan perbaikan, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

7. Peningkatan Inovasi dan Kualitas Layanan Publik

Mendorong inovasi dalam penyampaian informasi publik, baik dari sisi konten maupun metode layanan, agar lebih informatif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut, Biro Protokol, Humas, dan Media diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan pada tahun mendatang.